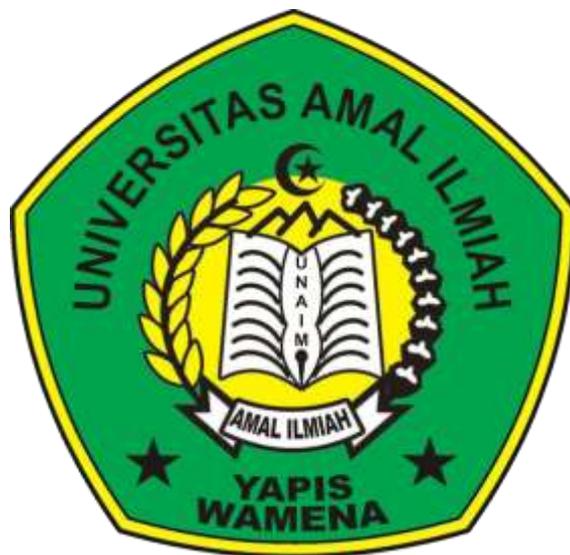


**PENGELOLAAN DANA KAMPUNG SAPALEK
DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik
Guna mencapai gelar sarjana S.AP pada
Program Studi Administrasi Publik*



Disusun Oleh

MOSES KARUNGGU

NIM :201811054

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENGELOLAAN DANA KAMPUNG SAPALEK
DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Identitas,

NAMA : MOSES KARUNGGU
NIM : 201811054
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK (S1)

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : 15 September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

H.MUHAMMAD ALI,S.Sos.,M.Si
NIDN :1417056701

GIRINIUS WENDA,S.Sos.,M.Si
NIDN:1412108801

Mengetahui,
Ketua Program Studi

IRMAYANI MISRAH,S.Sos,M.AP
NIDN:1412108402

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGELOLAAN DANA KAMPUNG SAPALEK
DISTRIK NAPUA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Telah dipertahankan skripsi ini di depan panitia ujian skripsi

Pada hari Senin tanggal 19 September 2022

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

H.MUHAMMAD ALIN,S.Sos.,M.Si
NIDN. 1417056701

GIRINIUS WENDA,S.Sos.,M.Si
NIDN. 1412108801

Anggota

Anggota

HASRIANI MUSLIM,S.Pd.,M.Pd
NIDN. 1409128201

TUKIJAN,S.Sos.,M.Si
NIDN. 1427016601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra.TELLY NANCY SILOOY,M.Si
NIDN.1207086701

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr.H.Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
2. Ibu Dra. Telly Nancy Silooy,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Imiah Yapis Wamena
3. Ibu Irmayani Misrah,S.Sos.,M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Bapak H.Muhammad Ali,S.Sos.,M.Si dan Bapak Girinius Wenda,S.Sos,M.Si selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran
5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada program studi Administrasi Publik yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi
6. Bapak S.Zakarias Yelipele,S.Sos selaku Kepala Kampung Sapalek yang telah memberikan ijin, rekomendasi dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian
7. Kedua orang tua yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan saudara-saudar yang telah membantu dengan sabar.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Sekolah Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Angkatan 2018/2019 atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, di mana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca.

Wamena, Agustus 2021

Penulis,

MOSES KARUNGGU
NIM. 2018-11-054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Teori	10
1. Pengertian Pengelolaan	10
2. Dana Kampung.....	13
3. Pengelolaan dana kampung	19
4. Faktor-faktor yang menghambat dana	26
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Definisi Operasional	34
D. Kerangka Konseptual Penelitian.....	35
BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	37
D. Instrumen Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Keadaan Lokasi Penelitian	41
2. Keadaan Responden	45
3. Analisa Data	46
B. Pembahasan.....	56

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Moses Karunggu (NIM. 2018-11-054) “*Pengelolaan Dana Kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya*”. (Pembimbing : Bapak H.Muhammad Ali dan Bapak Girinius Wenda).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kampung Sapalek. Penelitian ini merupakan variabel mandiri yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penarikan sampel, penulis menggunakan sampel jenuh sehingga diperoleh sampel adalah 13 orang aparat kampung. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan menggunakan perhitungan skor.

Berdasarkan pada hasil analisa data, diperoleh bahwa pengelolaan dana kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya menunjukkan pengelolaan dana kampung kurang baik dengan skor rata-rata 26,16 yang berada pada predikat cukup baik, diperoleh dari indikator perencanaan dengan skor 31,33; indikator pelaksanaan dengan skor 25; indikator pertanggungjawaban dengan skor 23,66 dan indikator evaluasi dengan skor 24,66

Indikator terendah berasal dari indikator pertanggungjawaban dan tertinggi berasal dari indikator perencanaan

Kata kerja : *Pengelolaan, Dana Kampung*

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Matriks penelitian	23
Tabel	3.1	Interpretasi nilai skor	30
Tabel	4.1	daftar Jumlah penduduk Distrik Bpiri	31
Tabel	4.2	Keadaan responden berdasarkan umur	42
Tabel	4.3	Keadaan responden berdasarkan pangkat/golongan...	42
Tabel	4.4	keadaan responden berdasarkan pendidikan.....	43
Tabel	4.5	keadaan responden berdasarkan masa kerja	43
Tabel	4.6	Keadaan responden berdasarkan jabatan	44
Tabel	4.7	Bapak/Ibu melakukan hubungan komunikasi dengan atasan.....	45
Tabel	4.8	Tanggapan responden berkaitan dengan komunikasi disampaikan secara	46
tabel	4.9	Tanggapan responden berkaitan dengan pemimpin menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan kepada semua pegawai	47
Tabel	4.10	Tanggapan responden berkaitan dengan pemimpin menanyakan suatu saran kepada pegawai pada saat rapat.....	48
Tabel	4.11	Tanggapan responden berkaitan bapak/Ibu sebagai Kepala Biro mendapatkan arahan langsung dari Kepala Distrik dalam menjalankan tanggung jawab.....	49
Tabel	4.12	Tanggapan responden berkaitan dengan Bapak/Ibu melakukan komunikasi dengan sesama pegawai setiap melakukan pekerjaan.....	50
Tabel	4.13	tanggapan responden berkaitan setiap pegawai saling memberitahukan suatu kegiatan satu sama lain	51
Tabel	4.14	tanggapan responden berkaitan Bapak/Ibu menginformasikan secara langsung atau menggunakan perantara.....	52

Tabel	4.15	tanggapan responden berkaitan dengan semua pekerjaan yang diarahkan oleh pimpinan langsung dapat dipahami oleh aparat distrik Bpiri.....	53
Tabel	4.16	tanggapan responden berkaitan dengan antara sesama pegawai saling berinteraksi.....	54
Tabel	4.22	Rata-rata skor indikator koordinasi vertikal	56
Tabel	4.23	Rata-rata skor indikator koordinasi horizontal	57
Tabel	4.24	hasil rata-rata variabel koordinasi.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	36
Gambar 4.1	Struktur organisasi Distrik Bpiri.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi hasil penelitian	
Lampiran 2 Surat penelitian dari LP2M	
Lampiran 3 Surat rekomendasi dari Kepala Kampung Sapalek.....	
Lampiran 4 Foto-foto hasil penelitian	
Lampiran 5 Biodata penulis.....	

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola” ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah “Manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu *management*, yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, Pengelolaan (menurut Syaiful Bahri Djamarah, 2006:174) berasal dari kata manajemen administrasi, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman (2006:3) : *Management* di terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Adisasmita (2011:22) Mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi Manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993) pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dan dikatakan Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:534) pengelolaan berarti proses, cara, perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Pengelolaan keuangan kampung diatur dalam peraturan pemerintah nomor 113 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang kampung, di mana disebutkan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan mendefinisikan pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.”

berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan pengelolaan diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (pemerintah kampung maupun masyarakat) dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi baik dan memiliki nilai – nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Nugroho (2003:119) Mengemukakan bawah Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu dalam kamus besar bahasa Indonesia, menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, dan pengontrolan, untuk mencapai efisien pekerjaan. Pendapat pamudji diats mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu:

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaruan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan – kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bawah pengelolaan pengendalian dan pemanfaatan semua factor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Dari pengertian diatas Admosudirjo menitik beratkan pengelolaan pada proses pengendalian dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bawah “ Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi Manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Nanang Fattah (2004) berpendapat bawah dalam proses manajemen terlibat fungsi – fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu Perencanaan (*Planing*), Pengorganisasian (*Organising*), Pemimpin (*Leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu Manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisng, pemimpin dan mengedalikan upaya organisasi dengan segala aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pada dasarnya Pengelolaan berhubungan dengan keuangan maka pengelolaan adalah mengelola suatu keuangan daerah berjalan secara efisien.

2. Dana Kampung

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana kampung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Rincian Dana setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis kampung setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- 1) 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk kampung;
- 2) 20% (duapuluh perseratus) untuk luas wilayah kampung; dan
- 3) 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan kampung

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Dana kampung adalah dana yang diberikan kepada kampung yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten /kota (pasal 1 ayat 11,

Peraturan Pemerintah, 72/2005). Dana kampung yang kemudian disebut Dana Kampung adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan kepala kampung dan memperkuat kewenangan kepala kampung.

Kewenangan kampung mencakup (a) kewenangan asal usul mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata local, yang diakui oleh negara. (b) Kewenangan atribut yang berskala local perencanaan, tata ruang, ekologi pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain – lain.

Menurut Bintarto (1983), kampung merupakan perwujud atau kesatuan geografi, sosial, Ekonomi, Politik, dan kultur yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Sedangkan kampung menurut widjaja (2003:3) dalam bukunya “ otonomi kampung” menyatakan bawah kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai kampung adalah keanekaragaman,partisipasi,otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Winardi (1988) kampung dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri.Pengertian ini menekankan adanya otonomi membangun tata kehidupan kampung bagi kepentingan penduduk dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bawah kepentingan dan kebutuhan masyarakat kampung hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat kampung dan bukan pihak luar.

Menurut Mardiasmo (2004:3) salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota sehingga ada dua alasan yang muncul adanya tuntutan

pemberian otonomi yang luas pada daerah pertama intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi didaerah.sedangkan Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawah new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Berbicara aspek- aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang otonomi daerah merupakan bentuk konkrit dari adanya good governance. Dalam hal ini World bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat .

Pengertian menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan diormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya kampung bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam perenan kampung sebagai wakil pemerintahan tingkat bawahan memberikan pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan – kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan ekonomi kampung menuju kemandirian kampung.penjabaran kewenangan kampung merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Maka kampung memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya tahun 2015 di Indonesia telah terukir

sejarah dalam otonomi daerah bawahannya otonomi langsung diberikan kepada kampung – kampung dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui kucuran dana kampung yang di transfer dari anggaran pendapatan belanja Negara. Ke daerah kabupaten dilanjutkan rekening kampung – kampung .

Menurut Ndraha (2005) Pengertian resmi tentang kampung menurut undang – undang adalah :

a) Undang – Undang nomor 5 Tahun 1979.

Kampung ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah distrik dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan republik indonesia.

b) Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Ini berarti kampung merupakan suatu pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Undang – undang nomor 32 Tahun 2004

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan diormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang kampung dan selanjutnya didukung dengan peraturan lainnya sebagai payung hukum pelaksanaan dana kampung andanya ketidak seimbangan atau kesenjangan antar daerah, telah lama mendapat perhatian dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, kemudian membangun dari pingiran selanjutnya menjadi salah satu program prioritas. Membangun dari pinggiran secara sederhana adalah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan atau pembangunan didaerah dan kampung – kampung.

Mengenai penggunaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana Kampung digunakan untuk beberapa pokok dengan ketentuan:

- 1) Paling banyak 70 % dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- 2) Paling sedikit 30% dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan perangkat kampung.
- 3) Operasional pemerintah kampung tunjangan dan operasional badan permusyawaratan kampung dan insentif rukun tetangan dan rukun warga.
- 4) Tersebut terlihat bawah keuangan kampung hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat kampung, badan permusyawaratan kampung dan rukun tetangga/warga rukun.

5) Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepala kampung bertidak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat kampung atau unsur kampung. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung daya gunakan swadaya dan gotong – royong masyarakat.

Kepala kampung adalah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pembentukan kampung persiapan meliputi:

- a.) Penetapan batas wilayah kampung sesuai dengan kaidah kartografis.
- b.) Pengelolaan anggaran operasional kampung persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kampung induk.
- c.) Pembentukan struktur organisasi.
- d.) Pengangkatan perangkat kampung.
- e.) Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk kampung.
- f.) Pembangunan sarana prasarana pembangunan kampung.
- g.) Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

3. Pengelolaan Dana kampung

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolah Dana kampung Bab V Pasal 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan kampung.

Pengelolaan dana kampung oleh pemerintah kampung dan/atau aparatur kampung dibagi menjadi beberapa indikator untuk pengelolaan dana kampung yang anda di antaranya :

- a) Pencairan dana kampung

Pemerintah terus mempermudah proses pencairan dana kampung langkah ini dilakukan agar dana kampung benar – benar memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan kawasan perkampung. Pemerintah melalui menteri keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Peraturan Menteri Keuangan.07/2017 tentang pengelolaan transfer atau pencairan dana kampung ke daerah dan dilanjutkan kekampung masing-masing. Dalam aturan ini pemerintah akan memperketat pencairan anggaran transfer ke daerah agar dapat benar – benar bermanfaat.

b) Teknis pencairan Dana Kampung

Tim pelaksana kampung yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan rencana penggunaan dana yang disesuaikan dengan hasil musyawarah kampung sesuai dengan ketentuan.

Permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung tahap I (satu) sebesar 40% (empat puluh persen) pada semester pertama diajukan paling lambat telah diterima oleh bagian pemerintahan kampung setda pada tanggal 31 mei tahun anggaran berjalan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

Pengajuan Anggaran Dana Kampung dapat dilakukan oleh pemerintah kampung apabila sudah ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja kampung yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

Tim pelaksana kampung mengirimkan pengajuan kepada tim pendamping tingkat distrik yang ditunjukkan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, lewat kepala bagian pemerintahan kampung secretariat daerah tersebut dilampiri dengan :

- a.) Foto copy peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja kampung untuk tahun yang bersangkutan (rangkap 3)
- b.) Nota Alokasi Dana Kampung tahap I (rangkap 2)
- c.) Kwintansi bermeterai (rangkap 5)
- d.) Surat pernyataan diatas meterai (rangkap 2)
- e.) Foto copy rekening kas kampung dilegaliser (rangkap 2)
- f.) Alokasi Dana Kampung tahap II tahun sebelumnya yang telah diverifikasi dan yang sahkan oleh kepala distrik (rangkap).
- g.) Surat rekomendasi kelayakan pencairan anggaran dana kampung dari distrik.
- h.) Laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung .
- i.) Peraturan kampung perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja kampung tahun sebelumnya.
- j.) dana bantuan keuangan kepada pemerintah kampung dari pemerintah provinsi dan kabupaten (rangkap 2).

Permohonan penyaluran dana kampung Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) pada semester kedua, paling lambat telah diterima oleh bagian pemerintahan kampung pada tanggal 1 setember tahun anggaran berjalan, dengan langkah sebagai berikut:

Pencairan tahap II setelah dana kampung tahap I digunakan dan sekurang – kurangnya 90%. Pengajuan Rencana Pembangunan kampung Tahap II tersebut dilampiri:

- a) Tahap I yang telah diverifikasi dan disahkan oleh distrik selaku penanggung jawab tim pendamping tingkat distrik.
- b) Nota pencairan dana kampung tahap I dan tahap I
- c) Nota pencairan dana kampung tahap II (rangkap 2)
- d) Kwitansi bermaterai cukup (rangkap 5);
- e) Surat pernyataan bermaterai cukup (rangkap 2)
- f) Poto copy buku rekening kas kampung dilegalisir (rangkap 2)

g) Foto copy sesuai Rencana Pembangunan Kampung Sebelum dan sesudah dilaksanakan/dikerjakan khususnya di kegiatan fisik.

h) Rekomendasi kelayakan pencairan dari distrik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a.) Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah kampung menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota yang pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan serta mengembangkan rencana aktivitas kerja. Proses penyusunan rencana kerja pemerintahan kampung Sapalek tahun 2021 telah dilakukan melalui Badan pemerintahan kampung lembaga kemasyarakatan kampung sebagai berikut :

- 1) Pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung.
- 2) Penyusunan perencanaan pembangunan kampung melalui musyawarah kampung.

- 3) Penyusunan rencana kerja dana kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

b.) Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran kampung yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran kampung. Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung. Jika kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran kampung harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat kampung. Perangkat kampung terdiri atas sekretariat kampung, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat kampung berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala kampung. Sekretariat kampung dipimpin oleh Sekretaris kampung dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan kampung. Pelaksanaan Pembangunan kampung harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan Rencana Kerja Perangkat Kampung dan Melalui Musyawarah kampung masyarakat berhak untuk mengetahui dan Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan Pembangunan kampung tersebut.

Pengelolaan Dana kampung harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah kampung dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan kampung Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bawah Pengelolaan dana kampung Harus mematuhi Kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat kampung. Pengelolaan dana kampung yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses Pengelolaan. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi pengelolaan dana kampung di kampung Sapalek distrik Napua kabupaten Jayawijaya.

Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 telah memberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yaitu Dana kampung di masing – masing kampung sesuai dengan kebutuhan kampung serta kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri bertujuan antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Lebih khusus penggunaan Dana kampung di Kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya.

c.) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara kampung. Kepala kampung dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan kampung harus menetapkan Bendahara kampung, penetapan Bendahara kampung harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala kampung. Bendahara adalah Perangkat kampung yang ditunjuk oleh Kepala kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja kampung. Bendahara kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d.) Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja kampung mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana kampung yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana kampung dan belanja Dana kampung. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan Dana kampung mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana kampung. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala kampung, Sekretaris kampung dan Bendahara kampung.

e.) Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban terdiri dari kepala kampung menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja kampung Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kampung.

Kepala kampung adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan kampung secara keseluruhan mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala kampung. Kepala kampung wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kepada Bupati/wali kota setiap semester tahun berjalan laporan semesteran, Selain itu kepala kampung wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kepada bupati/wali kota setiap akhir tahun anggaran, Laporan tahunan, laporan yang dibuat kepala kampung ditunjukkan kepada bupati/wali kota yang disampaikan melalui camat.

f.) Evaluasi

Evaluasi adalah proses penentuan nilai untuk penggunaan dana kampung berdasarkan pada pengelolaan dana kampung untuk mencapai tujuan dalam penggunaan dana kampung, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya pengelolaan mencapai tujuan pemerintahan pusat dan daerah yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut menentukan efektif atau tidak efektif pengelolaan dana kampung.

4. Faktor – Faktor yang menghambat dana kampung

- a.) Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan ditingkat kampung pelaksanaannya pengelolaan alokasi dana kampung sapalet distrik napua kabupaten jayawijaya dikampung mengalami beberapa kesulitan dengan kurangnya kesesuaian perencanaan ditingkat kampung dan distrik, Maka akan mempersulit langkah kampung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini masih terhalang dengan keputusan ditingkat distrik yang tidak sesuai dengan di tingkat kampung.
- b.) Jumlah dana kampung Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintahan. Jika dana kampung masih kurang hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat bawah dana kampung merupakan aspek viskal dalam pelaksanaan sebuah pembangunan kampung maka perlu adanya evaluasi mengenai penyelenggaraan dana kampung di kampung dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
- c.) Kurangnya intensitas Sosialisasi alokasi dana kampung pada masyarakat intensitas sosial masyarakat tentang alokasi dana kampung akan terlihat bawah sosialisasi terhadap masyarakat mengenai alokasi dana kampung masih minim.

Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap alokasi dana kampung juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam alokasi dana kampung maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya.

Dengan kurangnya pemahaman warga akan alokasi dana kampung maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana

kampung. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan melibatkan masyarakat.

5. Faktor – Faktor Pendukung Pengelolaan Dana kampung Sapalek Distrik Napua

a. Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah

Pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan alokasi dana kampung buku pendoman tersebut akan menjadi acuan pemerintah kampung dalam melaksanakan alokasi dana kampung dengan adanya peraturan tersebut, akan menunjukkan bawah pemerintah kabupaten/kota peduli terhadap pelaksanaan alokasi dana kampung dalam wilayahnya.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat pemerintahan kampung memiliki cukup pengetahuan dibidangnya masing – masing selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan kampung selain itu aparat kampung juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas – tugas yang diembannya.

Sumber daya manusia merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi.

Menurut para ahli Sedarmayanti (Umar, 2004:42) ciri - ciri sumber daya manusia yang produktif adalah tampak tindaknya konstruksif, percaya diri, Mempunyai rasa tanggungjawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya, Pandangan jauh kedepan, dan menyelesaikan persoalan.

Sedangkan menurut Siagian (1997:183) Mengemukakan bawah ada tujuh manfaat dari adanya pengembangan sumber daya manusia yaitu:

- a. Meningkatkan produktifitas kerja.
- b. Tersediahnya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- c. Meningkatnya semangat kerja seluruh anggota dalam organisasi.
- d. Mendorong sikap keterbukaan manajemen.
- e. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.
- f. Penyelesaian konflik secara fungsional.
- g. Terwujudnya hubungan yang terasi antara atasan dan bawahan.

Menurut pakar para pakar, Perencanaan sumber daya manusia sering diartikan sebagai kegiatan penentuan kuantitas dan kualitas Sumber daya manusia yang di perlukan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Yoder (Mangkunegara,2006: 31) mendefinisikan perencanaan tenaga kerja adalah proses pengembangan pengimplementasi, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar dan waktu yang tepat yang sangat bermanfaat secara ekonomis.

Sementara itu Barry (umar, 2004:13) menyatakan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk mencoba menetapkan keperluan tenaga kerja untuk suatu periode tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas dengan cara – cara tertentu.

Senada dengan pendapat diatas Siagin menyatakan perencanaan sumber daya manusia adalah suatu langkah – langkah tertentu yang diambil oleh manajemen personalia guna tersedianya tenaga yang cepat untuk menduduki berbagai kedudukan jabatan

pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dan akan ditetapkan.

6. Indikator Pengelolaan Dana Kampung

Peraturan menteri keuangan (PERMENKEU) Nomor 93/Peraturan Menteri Keuangan No.8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung tahun 2016. Penggunaan dana kampung diatur dalam pasal 21 yaitu. Dana kampung Sapalek distrik napua digunakan untuk dibiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana kampung sebagaimana maksud pada ayat (1) diprioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pendoman pada umumnya penggunaan dana kampung pada pasal 22 disebutkan bawah “ pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana kampung se bagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dari pendoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.”

Kemudian kewenangan kepala kampung, pemerintah dan pemerintahan daerah tentang penggunaan dana kampung diatur pada pasal 24. ” kepala kampung bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung pemerintah dan pemerintahan daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana kampung. Pengelolaan penggunaan anggaran dana kampung dapat melalui beberapa hal:

- a. Penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prioritas yang ditetapkan pada ditingkat kampung. penggunaan Dana Kampung dibagi menjadi 2 yaitu untuk belanja apartur dan operasional

pemerintahan kampung yang digunakan untuk. Belanja aparatur dan operasional pemerintahan kampung sebesar 30% dari total keseluruhan Dana Kampung

- b) Operasioanal pemerintah kampung sebesar 50% dari belanja aparatur dan operasioanal pemerintahan kampung yang digunakan untuk. Belanja barang dan jasa, pembelian/pengadaan barang belanja pemeliharaan sarana pemerintah kampung, belanja perjalanan dinas kepala kampung dan perangkat kampung sebesar 40% dari operasional pemerintah kampung dan Belanja pegawai sebesar 60% dari operasioanal pemerintah kampung untuk honor tim pelaksana kampung.
- c) Operasional badan penyelenggaraan kampung sebesar 25% dari belanja pemerintahan kampung dengan perincian sebagai berikut:
- d) Belanja barang dan jasa sebesar 40 % dari total operasional BPK yang digunakan untuk pembelian/pengandaan barang, belanja pemeliharaan sarana sekretaris dan perjalanan dinas ketua dan anggota Badan Pemerintahan Kampung.
- e) Belanja pegawai sebesar 60 % dari operasional badan penyelenggaraan kampung yang digunakan untuk tunjangan pimpinan dan anggota.
- f) Tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintahan kampung sebesar 25 % dari belanja pemerintahan kampung.
- g) Belanja modal publik sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Biaya perbaikan parasarana dan sarana public.
 - 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui modal Badan Usaha Milik kampung.
 - 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

- 5) Teknologi tempat guna.
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- 7) Pengembangan sosial budaya.
- 8) Kegiatan lainnya yang dianggap penting.

Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat, yang digunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja pegawai yang meliputi:

- i. Penunjang kegiatan PKK
- ii. Penunjang kegiatan LPMD
- iii. Penunjang kegiatan RT/RW.
- iv. Penunjang kegiatan karang taruna.
- v. Penunjang kegiatan hansip.

untuk plotting/pembagian besaran dana Kampung yang digunakan untuk tunjangan perangkat kampung, honor bendahara kampung dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan selain penunjang kegiatan, diserahkan sepenuhnya pada masing – masing kampung sesuai dengan rencana kegiatan selama satu tahun anggaran dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja kampung yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

Rincian penggunaan Dana Kampung selama satu tahun dituangkan dalam lampiran peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja kampung .

B. Penelitian Terdahulu

Matriks Penelitian terdahulu disajikan sebagai berikut:

Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Refrensi
1.	Nova sulastri	Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Lakapodo kecamatan watopute kabupaten muna tahun 2016	Hasil dari penelitian ini menunjukan bawah Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningtkan pembangunan fisik di desa lakapondo kecamatan watopute kabupaten muna,hasil penlitian musrembang maupun melaksanakan dan pertanggungjawaban yang diadakan oleh perangkat desa dalam pengalokasian dana desa masih kurang efektif,karena kurangnya transpransi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa terhadap masyarakat desa Lakapodo	E – Jurnal ekonomi dan bisnis universitas halu oleo tahun 2016

2.	Binti liklu'il maknu nah	Analisis distribusi alokasi dana desa kabupaten jember 2016	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawah retribusi alokasi dana desa kabupaten jember 2016 efektif karena kinerja pemerintahan desa melaksanakan program ADD khususnya dalam bidang pembangunan desa (meningkatkan in sфраstruktur desa) secara umum dapat dikatakan sudah efektif yang dibuktikan dengan insфраstruktur desa dari tahun ke tahun.	Jurnal skripsi jurusan akuntansi universitas jember tahun 2016.
3.	Erni tahir Bibi 14337	Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa jaya makmur kecamatan binongko	Hasil penelitian ini menunjukkan bawah pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa jaya makmur kecamatan binongko kabupaten wakatobi	Jurnal skripsi fakultas ekonomi dan bisnis universitas hulu oleo kendari 2017

		kabupaten wakatobi tahun 2017	tahun 2017 penelitian dikatakan efektif dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan desa untuk penyelenggaraan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,Partis ipasi,Otonomi,Demokr asi,dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran memberikan pelayanan.	
--	--	-------------------------------------	--	--

D. Definisi Operasional

Agar dapat memperoleh pemahaman yang relevan terhadap seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Maka konsep yang ditetapkan perlu didefinisikan secara operasional sehingga tidak terjadi salah penafsiran terhadap istilah – istilah yang digunakan, adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu istilah atau

variable dengan cara memberikan arti operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Berdasarkan definisi operasional tersebut diatas, maka penulis akan menguraikan variable yang telah sesuai dengan perumusan masalah sebagai berikut tentang variabel pengelolaan dana kampung.

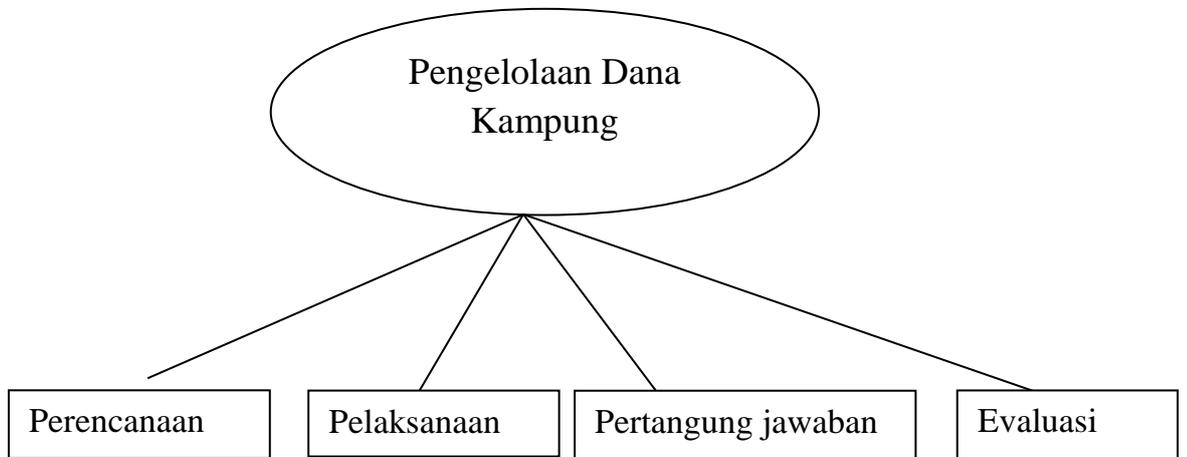
Pengelolaan dana kampung adalah suatu pencapaian tujuan dan pemanfaatan, dana kampung dengan indikator sebagai berikut: Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan evaluasi.

1. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan yang ingin dikerjakan/dicapai dimasa yang akan datang serta menentukan strategi suatu program utama yang ingin mau kerja.
2. Pelaksanaan merupakan salah satu inti pekerjaan proses yang mulai bekerja berdasarkan dengan perencanaan yang dibuat awalnya yang dipengerakkan para staf/bawahaannya berdsarkan pada rencana itu dengan maksud mewujudkan suatu tujuan rencana yang dicapai.
3. Pertanggungjawaban merupakan laporan semua kegiatan dalam kegunaan dana yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang digunakan dengan dicocokkan panduan juknis atau perencanaan yang dibuat awal sebelum dikerjakan.
4. Evaluasi merupakan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, disampaikan oleh kepala kampung melalui camat akan diteruskan kepada bupati/walikota.berupa laporan semesteran disampaikan sesuai penggunaan dana kampung yang disesuaikan dengan juknis program kerja kampungnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka koseptual bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian secara utuh, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar kerangka konseptual diatas terdiri Variabel (Indenpenden)
Bagimanakah Pengelolaan dana kampung Sapalek sebagai berikut:
Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Evaluasi.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai Dengan Judul Penelitian Ini, Maka Lokasi Penelitian Ini akan Dilaksanakan Di kampung Sapalek Di Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan selama + 2 Bulan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian deskriptif, menurut **Sugiyono (2011:11)** penelitian deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel Pengelolaan Dana kampung. Satu variable atau lebih (indenpenden) Tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan aspek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala - gejala benda – beda dan tingkah laku yang berfungsi sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2009; 90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai kampung Sapalek Distrik Napua sebanyak 13 orang (sumber: kantor kampung sapalek tahun 2022)

2. Sampel

Berdasarkan Populasi tersebut kemudian ditentukan sampel yang akan diteliti. Sampel Menurut Sugiyono (2009:90) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, Sampel dalam hal ini menunjukkan karakteristik yang diwakili sehingga memiliki ciri, sifat dan bentuk yang cermin dari populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Menurut Sugiyono apabila populasi kurang dari 30 orang maka seluruh populasi dapat dijadikan sampel. Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 orang.

D. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survey. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua instrument penelitian yaitu Kuesioner dengan menggunakan Skala Likert. Menurut **Sugiyono (2003:107)**, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan dengan kategori pilihan jawaban sebagai berikut:

1. Sangat baik Nilai skor = 5
2. Baik Nilai skor = 4
3. Cukup baik Nilai skor = 3
4. Kurang baik Nilai skor = 2
5. Tidak baik Nilai skor = 1

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara pengumpulan data dengan

masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pengamatan (*Observation*)

Suatu cara memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian.

2) Kuesioner (*Questioner*)

Menurut Sugiyono (2011:162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3) Penelitian Pustaka (*Library Research*).

Penelitian pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku buku literatur, diktat-diktat, bahan kuliah, Peraturan-Peraturan, Undang-Undang dan sebagainya yang memuat keterangan/informasi dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data

Menurut Hasan (2006:24), analisa data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Teknik analisa data deskriptif. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis skor pada skala ordinal. Dalam menentukan kategori jawaban responden digunakan jumlah skor ideal (maksimum), serta jumlah skor terendah.

$$\begin{aligned} 1. \text{ Jumlah skor ideal} &= 5 \times \text{jumlah responden} \\ &= 5 \times 13 \\ &= 65 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ Jumlah skor terendah} &= 1 \times 13 \\ &= 13 \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah skor ideal (65) dan jumlah skor terendah (13) maka tabel interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 3.1

Nilai interpretasi skor :

No.	Interval jumlah skor	Predikat
1	Jumlah Skor ≤ 65	baik
2	Jumlah Skor ≤ 52	
3	Jumlah Skor ≤ 39	baik
4	Jumlah skor ≤ 26	baik
5	Jumlah skor ≤ 13	Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Lokasi Penelitian

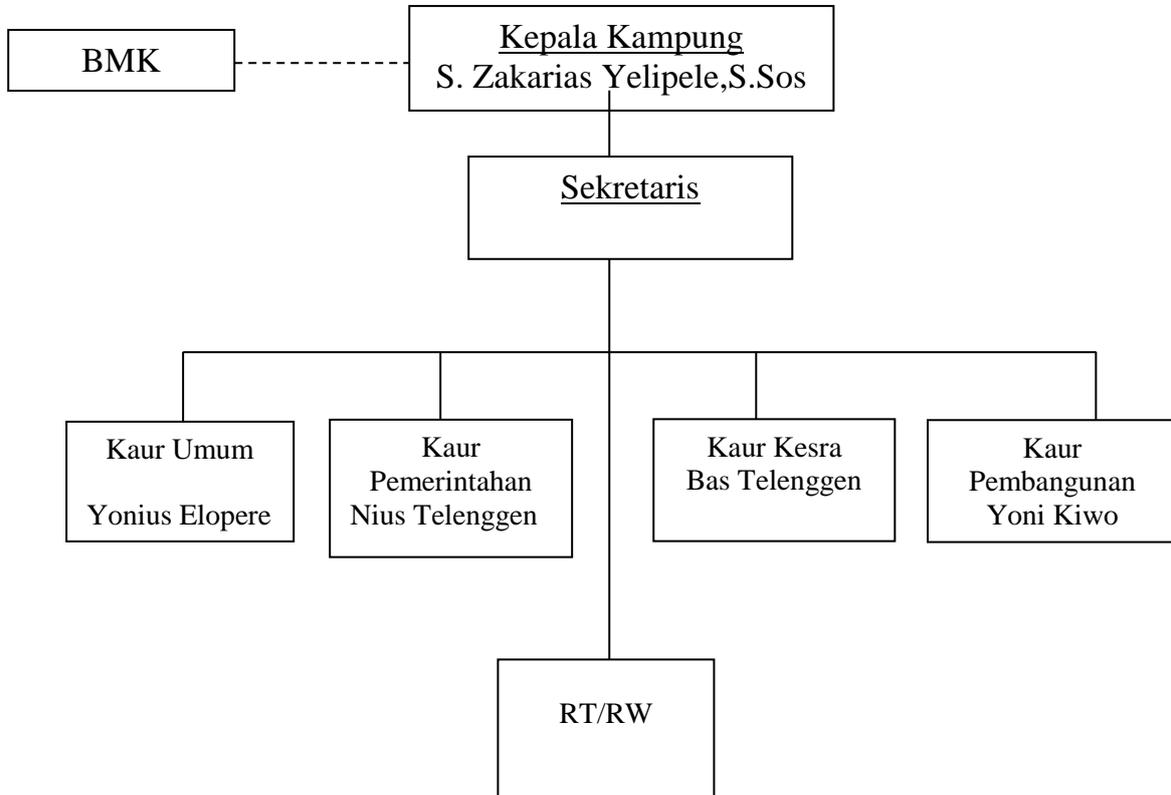
Kampung Sapalek merupakan salah satu dari Sembilan (9) kampung di Distrik Napua yang dimekarkan pada tahun 2010 dengan Kepala Kampung pertama bernama Bapak Zakarias Yelipele dengan melakukan permohonan kepada Bapak Bupati Wempi Wetipo. Kampung Sapalek mempunyai batas-batas wilayah yaitu :

- a) Bagian utara berbatasan Kampung Lani Matuan
- b) Bagian selatan berbatasan dengan Kali Ue
- c) Bagian barat berbatasan dengan Kampung Healema
- d) Bagian timur berbatasan Kuburan Umum Sinakma

Jarak dari Kampung Sapalek ke Kota Kabupaten \pm 3 km. jumlah masyarakat Kampung berdasarkan data monografi kampung sebanyak 1.710 orang atau 449 KK. Mata pencaharian masyarakat adalah bertani dan berternak. Hasil kebun antara lain umbi-umbian, sayur mayur, kacang-kacangan, serta buah. Sementara hewan yang ditenakkan paling banyak adalah babi, karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat adalah Kristen Protestan dan diikuti oleh agama Katholik.

Struktur organisasi pada Kampung Sapalek disajikan pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kampung Sapalek



Keterangan : _____ garis komando
 ----- garis koordinasi

Sumber data : Kantor Kampung Sapalek, 2022

f. Tugas dan Fungsi Aparat Kampung

Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala kampung mempunyai wewenang (sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018)

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BMK
- b) Mengajukan rancangan peraturan kampung

- c) Menetapkan peraturann kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BMK
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan kampung mengenai APB kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama BMK
- e) Membina kehidupan masyarakat kampung
- f) Membina perekonomian kampung
- g) Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif
- h) Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewajiban kepala kampung, adalah sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik

- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat di kampung
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu, kewajiban kepala kampung untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada Bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BMK, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat.

Sekretaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada di bawah kepala kampung. Sekretaris kampung mempunyai tugas membantu kepala kampung dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi. Sekretaris kampung mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah
- b) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah kampung dan kemasyarakatan
- c) Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga kampung, surat-menyurat dan kearsipan
- d) Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat
- e) Menyusun laporan pemerintah kampung
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung

- g) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris kampung dibantu 2 orang staf, yaitu staf umum dan staf keuangan

Unsur teknis, berada di bawah kepala kampung dan bertanggung jawab kepada kepala kampung. Unsur teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR). Unsur teknis terdiri dari :

- 1) Urusan pembangunan
- 2) Urusan kesejahteraan rakyat
- 3) Urusan pemerintahan

2. Keadaan Responden

Keadaan responden pada penelitian ini terlihat pada tabel berikut :

- a) Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan terlihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMA	2	15,38
2.	SMP	5	38,46
3.	SD	3	23,08
4.	Tidak Sekolah	3	23,08
Jumlah		13	100

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.1 terlihat responden mempunyai pendidikan paling tinggi yaitu SMA sebanyak 2 orang (15,38 %), SMP sebanyak 5 orang (38,46 %), SD dan tidak sekolah sama-sama sebanyak 3 orang (23,08 %).

b) Keadaan responden berdasarkan agama

Keadaan responden berdasarkan agama terlihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Keadaan responden berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kristen Protestan	13	100
2.	Katholik	-	0
3.	Islam	-	0
4.	Budha	-	0
5.	Hindu	-	0
Jumlah		13	100

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.2 terlihat seluruh responden beragama Kristen Protestan (100 %).

c) Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin terlihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki – laki	13	100
2.	Perempuan	-	0
Jumlah		13	100

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.3 terlihat seluruh responden berjenis kelamin laki – laki (100 %).

3. Analisa Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Perangkat Kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya dengan cara pengamatan dan pembagian kuesioner kepada responden.

Dengan variabel pengelolaan dana kampung dengan indikatornya : perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi.

a. Perencanaan

Indikator perencanaan terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut:

- 1) Ada perencanaan dalam memulai kegiatan atau Musrenbang

Tanggapan responden tentang ada perencanaan dalam memulai kegiatan atau Musrenbang disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tanggapan responden tentang ada perencanaan dalam memulai kegiatan atau Musrenbang

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	2	10
2.	Baik	4	1	4
3.	cukup baik	3	1	3
4.	kurang baik	2	4	8
5.	Tidak baik	1	5	5
Nilai			13	30

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas diperoleh skor sebesar 30 yang berada pada predikat cukup baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 10; baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 1 orang dengan skor 3, kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 8 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 5 orang dengan skor 5 .

2) Ada koordinasi antara Perangkat kampung dan masyarakat dalam perencanaan

Tanggapan responden tentang ada koordinasi antara Perangkat kampung dan masyarakat dalam perencanaan disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tanggapan responden tentang ada koordinasi antara Perangkat kampung dan masyarakat dalam perencanaan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	2	8
3.	cukup baik	3	4	12
4.	kurang baik	2	2	4
5.	Tidak baik	1	4	4
Nilai			13	33

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas diperoleh skor sebesar 33 yang berada pada predikat cukup baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5; baik sebanyak 2 orang dengan skor 8; cukup baik sebanyak 4 orang dengan skor 12, kurang baik sebanyak 2 orang dengan skor 4 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 4 orang dengan skor 4 .

3) Perencanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung

Tanggapan responden tentang perencanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tanggapan responden tentang perencanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	cukup baik	3	3	9
4.	kurang baik	2	5	10
5.	Tidak baik	1	3	3
Nilai			13	31

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas diperoleh skor sebesar 31 yang berada pada predikat cukup baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5; baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 3 orang dengan skor 9, kurang baik sebanyak 5 orang dengan skor 10 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 3 orang dengan skor 3 .

b. Pelaksanaan

Indikator pelaksanaan terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan

Tanggapan responden tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Tanggapan responden tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	-	-
2.	Baik	4	1	4
3.	cukup baik	3	3	9
4.	kurang baik	2	2	4
5.	Tidak baik	1	7	7
Nilai			13	24

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.7 di atas diperoleh skor sebesar 24 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab baik sebanyak 11 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 3 orang dengan skor 9, kurang baik sebanyak 2 orang dengan skor 4 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 7 orang dengan skor 7 .

2) Seluruh aparat kampung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

Tanggapan responden tentang seluruh aparat kampung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Tanggapan responden tentang seluruh aparat kampung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	cukup baik	3	1	3
4.	kurang baik	2	4	8
5.	Tidak baik	1	6	6
Nilai			13	26

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas diperoleh skor sebesar 26 yang berada pada predikat baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5; baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 1 orang dengan skor 3, kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 8 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 6 orang dengan skor 6 .

3) Kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat

Tanggapan responden tentang kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Tanggapan responden tentang kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	-	-
3.	cukup baik	3	1	3
4.	kurang baik	2	6	12
5.	Tidak baik	1	5	5
Nilai			13	25

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas diperoleh skor sebesar 25 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5; cukup baik sebanyak 1 orang dengan skor 3; kurang baik sebanyak 6 orang dengan 12 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 5 orang dengan skor 5 .

c. **Pertanggungjawaban**

Indikator pertanggungjawaban terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut :

1) Kepala kampung bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran dana kampung

Tanggapan responden tentang kepala kampung bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran dana kampung disajikan pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Tanggapan responden tentang kepala kampung bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran dana kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	cukup baik	3	3	3
4.	kurang baik	2	3	6
5.	Tidak baik	1	5	5
Nilai			13	23

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.10 di atas diperoleh skor sebesar 23 yang berada pada predikat baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5; baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 3 orang dengan skor 3; kurang baik sebanyak 3 orang dengan skor 6 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 5 orang dengan skor 5 .

2) Ada pertanggungjawaban kepada masyarakat

Tanggapan responden tentang ada pertanggungjawaban kepada masyarakat disajikan pada tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Tanggapan responden tentang ada pertanggungjawaban kepada masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	cukup baik	3	1	3
4.	kurang baik	2	3	6
5.	Tidak baik	1	7	7
Nilai			13	25

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.11 di atas diperoleh skor sebesar 25 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5; baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 1 orang dengan skor 3; kurang baik sebanyak 3 orang dengan skor 6 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 7 orang dengan skor 7 .

3) Pertanggungjawaban dilakukan dengan tepat waktu

Tanggapan responden tentang pertanggungjawaban dilakukan dengan tepat waktu disajikan pada tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan responden tentang pertanggungjawaban dilakukan dengan tepat waktu

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	cukup baik	3	-	-
4.	kurang baik	2	3	6
5.	Tidak baik	1	8	8
Nilai			13	23

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.12 di atas diperoleh skor sebesar 23 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5; baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; kurang baik sebanyak 3 dengan skor 6 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 8 orang dengan skor 8.

d. Evaluasi

Indikator evaluasi terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut:

1) Meningkatkan dan memantapkan kemampuan aparat kampung

Tanggapan responden tentang meningkatkan dan memantapkan kemampuan aparat kampung disajikan pada tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13
Tanggapan responden tentang meningkatkan dan memantapkan kemampuan aparat kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	-	-
2.	Baik	4	1	4
3.	Cukup baik	3	1	3
4.	Kurang baik	2	5	10
5.	Tidak baik	1	6	6
Nilai			13	23

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.13 di atas diperoleh skor sebesar 23 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 1 orang dengan skor 3; kurang baik sebanyak 2 orang dengan skor 6 dan

responden yang menjawab tidak baik sebanyak 6 orang dengan skor 6.

2) Adanya perbaikan dari program terdahulu

Tanggapan responden tentang adanya perbaikan dari program terdahulu disajikan pada tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Tanggapan responden tentang adanya perbaikan dari program terdahulu

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	-	-
2.	Baik	4	1	4
3.	Cukup baik	3	2	6
4.	Kurang baik	2	5	10
5.	Tidak baik	1	5	5
Nilai			13	25

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.14 di atas diperoleh skor sebesar 25 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 5 orang dengan skor 10 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 5 orang dengan skor 5.

3) Adanya pengawasan dari aparat kampung terhadap dana kampung

Tanggapan responden tentang adanya pengawasan dari aparat kampung terhadap dana kampung disajikan pada tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15
Tanggapan responden tentang adanya pengawasan dari
aparatur kampung terhadap dana kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	5	1	5
2.	Baik	4	1	4
3.	Cukup baik	3	1	3
4.	Kurang baik	2	4	8
5.	Tidak baik	1	6	6
Nilai			13	26

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.15 di atas diperoleh skor sebesar 26 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 5; baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; cukup baik sebanyak 1 orang dengan skor 3; kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 8 dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 6 orang dengan skor 6.

B. Pembahasan

Untuk menunjukkan hasil penilaian dari analisis data, maka penulis melakukan interpretasi data secara keseluruhan untuk mengetahui hasil pengelolaan dana Kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. Rata-rata skor indikator perencanaan

Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.

Rata-rata indikator perencanaan disajikan pada tabel 4.16 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Rata-rata Indikator Perencanaan

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Ada perencanaan dalam memulai kegiatan atau Musrenbang	30	Cukup baik
2	Ada koordinasi antara Perangkat kampung dan masyarakat dalam perencanaan	33	Cukup baik
3	Perencanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung	31	Cukup baik
Jumlah		94	
Rata-rata		31,33	Cukup baik

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.16 di atas, menunjukkan nilai rata-rata skor sebesar 31,33 yang berada pada predikat cukup baik. Hasil ini diperoleh dari sub indikator ada perencanaan dalam memulai kegiatan atau Musrenbang dengan skor 30; ada koordinasi antara perangkat kampung dan masyarakat dalam perencanaan dengan skor 33 dan Perencanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung dengan skor 31.

Berdasarkan pada hasil di atas menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana kampung Sapalek Distrik Napua cukup baik di mana ada Musyawarah (Musrenbang) yang dilakukan, ada koordinasi dengan masyarakat dan cukup baik dalam perencanaan pembangunan sesuai yang dibutuhkan masyarakat.

2. Rata-rata skor indikator pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan kampung harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan Rencana Kerja Perangkat Kampung dan Melalui Musyawah kampung masyarakat berhak untuk mengetahui dan Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan Pembangunan kampung tersebut.

Rata-rata indikator pelaksanaan disajikan pada tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4.17
Rata-rata Indikator Pelaksanaan

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan	24	Kurang baik
2	Seluruh aparat kampung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan	26	Kurang baik
3	Kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat	25	Kurang baik
Jumlah		75	
Rata-rata		25	Kurang baik

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.17 di atas, menunjukkan nilai rata-rata skor sebesar 25 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari sub indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dengan skor 24; seluruh aparat kampung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dengan skor 26 dan kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat dengan skor 25.

Berdasarkan pada hasil di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana Kampung Sapalek Distrik Napua kurang baik, di mana pelaksanaan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, aparat kampung kurang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pembangunan kurang melibatkan masyarakat.

3. Rata-rata skor indikator pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terdiri dari kepala kampung menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja kampung Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Rata-rata indikator pertanggungjawaban disajikan pada tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel 4.18

Rata-rata Indikator Pertanggungjawaban

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Kepala kampung bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran dana kampung	23	Kurang baik
2	Ada pertanggungjawaban kepada masyarakat	25	Kurang baik
3	pertanggungjawaban dilakukan dengan tepat waktu	23	Kurang baik
Jumlah		71	
Rata-rata		23,66	Kurang baik

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.18 di atas, menunjukkan nilai rata-rata skor sebesar 23,66 yang berada pada predikat kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari sub indikator Kepala kampung bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran dana kampung dengan skor 23; Ada pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan skor 25 dan indikator pertanggungjawaban dilakukan dengan tepat waktu dengan skor 23.

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban di Kampung Sapalek Distrik Napua kurang baik, di mana Kepala Kampung kurang bertanggung jawab dalam penggunaan dana kampung, kurang adanya pertanggungjawaban penggunaan dana kampung ke masyarakat, dan kurang tepat waktu dalam pertanggungjawaban penggunaan dana kampung.

4. Rata-rata skor indikator evaluasi

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya pengelolaan mencapai tujuan pemerintahan pusat dan daerah.

Rata-rata indikator evaluasi disajikan pada tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.19

Rata-rata Indikator Evaluasi

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Meningkatkan dan memantapkan kemampuan aparat kampung	23	Kurang baik
2	Adanya perbaikan dari program terdahulu	25	Kurang baik
3	Adanya pengawasan dari aparat kampung terhadap dana kampung	26	Kurang baik
Jumlah		74	
Rata-rata		24,66	Kurang

		baik
--	--	------

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.19 di atas, menunjukkan nilai rata-rata skor sebesar 24,66 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari sub indikator meningkatkan dan memantapkan kemampuan aparat kampung dengan skor 23; Adanya perbaikan dari program terdahulu dengan skor 25 dan adanya pengawasan dari aparat kampung terhadap dana kampung dengan skor 26.

Berdasarkan pada hasil di atas menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan dana kampung Sapalek Distrik Napua kurang baik, di mana kurang adanya peningkatan kemampuan aparat kampung tentang pengelolaan dana kampung, kurang adanya perbaikan dari program terdahulu yang sering terjadi kesalahan yang sama, dan kurang adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung.

5. Rekapitulasi skor variabel pengelolaan dana kampung

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas diperoleh hasil rata-rata variabel pengelolaan dana kampung disajikan pada tabel 4.20 di bawah ini :

Tabel 4.20
Hasil Rata-rata Variabel Pengelolaan Dana Kampung

No.	Indikator	Skor	Predikat
1.	Perencanaan	31,33	Cukup baik
2.	Pelaksanaan	25	Kurang baik
3.	Pertanggungjawaban	23,66	Kurang baik
4.	Evaluasi	24,66	Kurang baik
Jumlah		104,65	
Rata-rata		26,16	Cukup baik

Sumber data : hasil olahan data primer, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.20 di atas menunjukkan skor rata-rata sebesar 26,16 yang berada pada predikat cukup baik. Ini

menunjukkan pengelolaan dana kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya cukup baik.

Skor rata-rata ini diperoleh dari indikator perencanaan dengan skor 31,33; indikator pelaksanaan dengan skor 25; indikator pertanggungjawaban dengan skor 23,66 dan indikator evaluasi dengan skor 24,66. Skor tertinggi berasal dari indikator perencanaan, di mana adanya musrenbang dalam pengelolaan dana kampung dan skor terendah berasal dari indikator pertanggungjawaban. Di mana pertanggungjawaban yang dilakukan kurang tepat waktu, sehingga pencairan dana kampung selanjutnya terhambat karena pertanggungjawaban yang lambat. Selain itu kurang terbuka ke masyarakat.

Hasil penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian milik Nova sulastri dengan judul penelitian Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Lakapodo kecamatan Watopute kabupaten muna tahun 2016 dengan hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa lakapodo kecamatan watopute kabupaten muna, hasil penelitian musrenbang maupun melaksanakan dan pertanggungjawaban yang diadakan oleh perangkat desa dalam pengalokasian dana desa masih kurang efektif, karena kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa terhadap masyarakat desa Lakapodo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisa data, diperoleh bahwa pengelolaan dana kampung Sapalek Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya menunjukkan pengelolaan dana kampung kurang baik dengan skor rata-rata 26,16 yang berada pada predikat cukup baik, diperoleh dari indikator perencanaan dengan skor 31,33; indikator pelaksanaan dengan skor 25; indikator pertanggungjawaban dengan skor 23,66 dan indikator evaluasi dengan skor 24,66

Indikator terendah berasal dari indikator pertanggungjawaban dan tertinggi berasal dari indikator perencanaan.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan pengelolaan dana kampung hendaknya melibatkan seluruh masyarakat
2. Pelaksanaan hendaknya tepat waktu dan melibatkan seluruh masyarakat dalam kegiatannya
3. Pertanggungjawaban hendaknya dilakukan di depan masyarakat dan secara transparan
4. Evaluasi hendaknya dilakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan aparat kampung dalam mengelolanya

INSTRUMENT PENELITIAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor responden :.....
2. Tingkat pendidikan :.....
3. Agama :.....
4. Jenis kelamin :.....

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda check list/centang pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan jawaban anda penilaian dilakukan berdasarkan skala berikut:

No.	PERTANYAAN		Skor
1	Sangat Baik		5
2.	Baik		4
3	Cukup Baik		3
4.	Kurang Baik	(KB)	2
5	Tidak Baik		1

Daftar Pertanyaan

1. Perencanaan

No	PERTANYAAN	SKALA				
		SB	B	CB	KB	STB
1	Ada Perencanaan Kegiatan					
2						
3.						
4	ada koordinasi antara Perangkat kampung dan masyarakat dalam perencanaan					
5	Apakah perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung					

2. Pelaksanaan

No	PERTANYAAN	SKLA				
		SB	B	CB	KB	STB
1	Apakah Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan					
2	Faktor – factor apa saja yang Menghambat dalam Pelaksanaan kegiatan					
3	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan					
4	Apakah Pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat					

5	Apakah Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan					
---	--	--	--	--	--	--

3. Pertanggungjawaban

No	PERTANYAAN	SKALA				
		SB	B	CB	KB	STB
1	Kapan saja Melakukan pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan					
2	Faktor – factor apa saja yang Menghambat dalam Pertanggungjawaban					
3	Kepala kampung bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran dana kampung					
4	Siapa saja yang terlibat dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan					
5	Apakah dalam Pertanggungjawabkan masyarakat					

4.Evaluasi

No	PERTANYAAN	SKALA				
		SB	B	CB	KB	STB
1	kapan Evaluasi dilakukan					
2	apakah evaluasi itu sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan					
3	Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kegiatan					
4	Faktor – factor apa saja yang Menghambat dalam evaluasi					
5	Apakah ada koordinasi antara Perangkat					

	kampung dan masyarakat dalam evaluasi					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--